



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Mastrip Nomor 23 Telp/Fax : (0351) 462927
Website : diskominfo.madiunkab.go.id - Email : diskominfo@madiunkab.go.id

MADIUN - 63117

BERITA ACARA
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NOMOR	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data pribadi ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	1. Mengungkap data pribadi yang merupakan ranah privasi 2. Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
2.	Dokumen dan proses usulan mutasi/pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/fungsional	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas di lingkungan kerja	Sampai dengan Pelantikan/mutasi
3.	Dokumen proses ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		c. Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Juklak PP Nomor 53 Tahun 2010			
4.	Daftar Kekayaan ASN kecuali ASN yang Wajib LHKPN	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322 c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 44 d. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep.07/KPK/02/2005 ttg Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia - Timbulnya penyimpangan 	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat Rahasia	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
5.	Data wajib pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Bab 14 Pasal 172 c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan wajib pajak	Selama Perda belum dicabut
6.	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara premature (informasi apabila dibuka	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Sampai penetapan pemenang

			menimbulkan penilaian tidak obyektif		
7.	SPJ dan Bukti-bukti pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan c. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 	Dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan	Terbatas sampai setelah selesai audit APIP/BPK
8.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 6 ayat 3 huruf d. jo pasal 17 huruf l UU no 14 Tahun 2008 ttg KIP b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/004/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah e. Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengeawas Pemerintah 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas

9.	Data SP2D Pihak ke-3	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Ayat 2 c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasal 3 d. Permendagri 13 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan usaha	Permanen
10.	Laporan Keuangan yang belum diaudit BPK	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 3 d. Permendagri 13 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara b. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik 	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK

11.	Proses Evaluasi pengadaan barang jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 3 	Melindungi pelanggan tetap dapat dipertanggung jawabkan	Perlindungan usaha	Permanen
12.	Rincian informasi terkait nomor rekening perusahaan dan rincian HPS dalam dokumen kontrak pengadaan barang jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 3 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi para pihak yang terlibat kontrak b. Menghindari permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait 	Perlindungan usaha	<p>Sampai dengan penandatanganan perjanjian kontrak</p> <p>Sampai dengan penyerahan berkas</p>
13.	Dokumen penawaran pengadaan barang jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 3 	Melindungi hak dan kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	Sampai proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama
14.	Data user dan password administrator website/kode akses elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keamanan data terancam 2. Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain 	Melindungi keamanan sistem	Selama sistem digunakan

		2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
15.	Security Network	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>1. Keamanan data terancam</p> <p>2. Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain</p>	Melindungi keamanan sistem	Selama sistem digunakan
16.	Lokasi Server	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data	Melindungi keamanan sistem	Selama sistem digunakan
17.	Internet Protocol/IP Adress Private beserta topologi jaringan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	Mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses	Melindungi keamanan sistem	Selama sistem digunakan
18.	Konfigurasi dan aplikasi beserta <i>username</i> dan <i>password</i>	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses	Melindungi keamanan sistem	Selama sistem digunakan

		b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
19.	Manajemen Bandwith	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwith di luar ketentuan	Melindungi keamanan sistem	Selama sistem digunakan
20.	Setting konfigurasi jaringan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi keamanan sistem	Selama sistem digunakan
21.	Berita Sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan kemanan negara	Semua berita masih bersifat rahasia

22.	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan kemanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
23.	Perangkat khusus persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan kemanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
24.	Kunci Sistem Sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan kemanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
25.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan kemanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
26.	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan kemanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
27.	Berita/Radiogram Rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;	Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara	Melindungi pertahanan dan kemanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
28.	Sistem Keamanan Informasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, l, dan j; b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
29.	Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis	Selama berlaku

	TIK Pemerintah Kabupaten Madiun	Informasi Publik Pasal 17 huruf b, l, dan j; b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		elektronik di Pemerintah Kabupaten Madiun	
30.	Data pengaduan masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Keamanan informasi pribadi terancam	Melindungi privasi pelapor	Permanen

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Kabupaten Madiun



Drs. SAWUNG REHTOMO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700825 199003 1 001

Madiun, 28 Februari 2023

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Perangkat Daerah Pembantu

BIBIT WIYONO, S.Sos
Pembina
NIP. 19701025 199103 1 004